

OMBUDSMAN SULSEL INSPEKSI PASAR TERONG, SOROTI FASILITAS DAN LONJAKAN HARGA JELANG RAMADAN

Jum'at, 28 Februari 2025 - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan

MAKASSAR-Menjelang bulan Ramadan, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan melakukan inspeksi di Pasar Terong, Makassar, pada Jumat (28/2). Inspeksi ini dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Ismu Iskandar, didampingi oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Arlin Ariesta, serta perwakilan dari Perumda Pasar Makassar Raya, Lurah Tompo Balang Yunus, dan Kepala UPT Pasar Terong.

Dalam inspeksi tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah permasalahan, terutama terkait fasilitas pasar yang belum memadai. Toilet dan ruang kesehatan tidak tersedia, serta pemanfaatan gedung pasar belum optimal, terlihat dari banyaknya pedagang yang masih berjualan di bahu dan badan jalan.

"Kondisi ini membutuhkan perhatian serius agar fasilitas yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik dan memberikan kenyamanan bagi pedagang serta pembeli," ujar Ismu Iskandar.

Menurut Ismu, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021, setiap pasar rakyat harus memiliki fasilitas penunjang seperti toilet, ruang menyusui, ruang kesehatan, tempat parkir, serta sarana air bersih. Dengan belum tersedianya fasilitas-fasilitas tersebut, kondisi Pasar Terong dinilai belum memenuhi standar. Ombudsman meminta pihak pengelola dan pemerintah daerah segera melakukan perbaikan agar pasar dapat berfungsi optimal.

Selain mengecek fasilitas, Ombudsman juga memantau harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan menjelang Ramadan. Harga minyak goreng Minyak Kita tercatat melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp. 16.500,- per liter dari HET Rp. 15.700,- per liter. Kenaikan harga cabai yang mencapai Rp. 90.000,- per kilogram juga menjadi perhatian.

Sejumlah pedagang turut mengeluhkan penghentian stok Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) sejak 7 Februari 2025, yang selama ini membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau.

"Kami berharap program SPHP dapat segera dilanjutkan, karena harga beras serupa kini mencapai Rp. 14.000,- per kilogram dibandingkan HET sebelumnya Rp. 12.500,- per kilogram," ujar salah seorang pedagang.

Ombudsman RI Perwakilan Sulsel menegaskan akan terus memantau perkembangan harga serta mendorong peningkatan kualitas fasilitas pasar guna mendukung kenyamanan dan stabilitas ekonomi masyarakat.

Penulis: Ardhi